

# INSTITUTIONAL & ANALYSIS DEVELOPMENT-FRAMEWORK (IAD)

Week 15

Institutional Economics

Dr. Rambu L.K.R. Nugrohowardhani, S.E.,M.A

Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

Indonesia

## **SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH**

1. Mengetahui definisi dari analisis kelembagaan;
2. Memahami alasan, fungsi, dan tujuan dari analisis kelembagaan;
3. Memahami sejarah awal munculnya instrumen IAD;
4. Memahami komponen utama instrumen IAD;
5. Memahami cara menggunakan instrumen IAD.

# TOPIK HARI INI

1. Definisi dari analisis kelembagaan
2. Signifikansi (alasan, fungsi, dan tujuan) dari analisis kelembagaan;
3. Sejarah perkembangan instrumen IAD;
4. Komponen utama instrumen IAD;
5. Penggunaan instrumen IAD.

# ANALISIS KELEMBAGAAN?

Pendekatan yang digunakan untuk memahami peran lembaga dalam mempengaruhi perilaku individu dan kelompok pada masyarakat.

Lembaga yang dimaksud bukan berarti organisasi formal, melainkan aturan main yang mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan politik, baik yang bersifat formal (misalnya; hukum dan regulasi) maupun informal (misalnya; nilai dan tradisi).

Analisis kelembagaan dilakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan seperti; bagaimana aturan dan norma tertentu muncul dan bertahan, bagaimana aturan tersebut berdampak pada keputusan dan perilaku manusia, serta bagaimana aturan dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti kesejahteraan yang lebih merata atau pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

# MENGAPA PERLU ANALISIS KELEMBAGAAN?

Analisis kelembagaan penting dilakukan karena lembaga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan keputusan individu atau kelompok dalam masyarakat. Analisis ini menjadi krusial untuk memahami bagaimana lembaga bekerja dan bagaimana perubahan lembaga dapat mempengaruhi hasil perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan

# FUNGSI ANALISIS KELEMBAGAAN

1. Membantu memahami aturan-aturan yang mendasari perilaku dalam suatu konteks tertentu, termasuk aturan yang mungkin tidak tertulis atau tidak disadari.
2. Membantu melihat bagaimana individu atau kelompok berinteraksi satu sama lain berdasarkan aturan yang berlaku, serta dampaknya pada hasil.
3. Membantu menilai apakah suatu aturan efektif dalam mencapai tujuan tertentu dan apakah aturan tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang.

# TUJUAN ANALISIS KELEMBAGAAN

- 1. Mendukung pembuatan kebijakan yang tepat sasaran**  
Dengan memahami peran lembaga dalam suatu sistem, pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih sesuai dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat.
- 2. Meningkatkan keadilan dan efisiensi**  
Analisis kelembagaan membantu mengidentifikasi hambatan kelembagaan yang mengganggu akses atau partisipasi yang adil dalam proses ekonomi dan sosial.
- 3. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya**  
Analisis kelembagaan membantu memastikan bahwa sumber daya dapat dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Salah satu instrumen dalam analisis kelembagaan yang banyak digunakan adalah ***Institutional Analysis and Development (IAD) Framework***, yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom. IAD dirancang untuk membantu peneliti dan praktisi memahami kompleksitas interaksi manusia dalam konteks aturan dan lembaga yang mempengaruhinya. IAD membantu menganalisis bagaimana aturan, norma, dan struktur lembaga lainnya membentuk keputusan individu dalam berbagai situasi.

# SEKILAS SEJARAH KKAPK/IAD

Kerangka *Institutional Analysis and Development* (IAD) dikembangkan oleh Elinor Ostrom dan rekan-rekannya di Universitas Indiana, AS, sejak tahun 1970-an. Latar belakang munculnya *IAD Framework* ini didasari oleh perhatian Ostrom terhadap masalah pengelolaan sumber daya bersama (*common-pool resources*) dan kelembagaan yang mengaturnya, khususnya dalam menghadapi permasalahan yang disebut sebagai "tragedi bersama" atau *tragedy of the commons*, konsep yang diusulkan oleh Garret Hardin pada tahun 1968.

- Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, *tragedy of the commons* menjadi topik yang populer. Hardin menyatakan bahwa ketika sumber daya alam dikelola secara bersama, individu akan cenderung mengeksploitasinya secara berlebihan karena tidak ada insentif untuk menjaga keberlanjutan. Teori ini menyatakan bahwa pengelolaan bersama pada akhirnya akan mengarah pada kerusakan sumber daya.
- Mayoritas akademisi waktu itu mendukung dua solusi utama: privatisasi atau kontrol pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya. Namun, Ostrom mengamati bahwa di berbagai komunitas di seluruh dunia, masyarakat lokal mampu mengelola sumber daya bersama berkat aturan dan kelembagaan yang mereka bentuk sendiri.

- Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana lembaga lokal bekerja dalam mengelola sumber daya bersama, Ostrom dan rekan-rekannya di Universitas Indiana memulai serangkaian penelitian di berbagai komunitas. Mereka meneliti bagaimana aturan-aturan lokal (baik formal maupun informal) membantu menjaga keberlanjutan dan mengatasi konflik terkait sumber daya bersama.
- Dari penelitian ini, Ostrom menyadari bahwa diperlukan alat analisis yang bisa membantu memahami kompleksitas aturan dan perilaku manusia dalam berbagai konteks pengelolaan sumber daya. *IAD Framework* pun lahir sebagai sebuah kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis bagaimana lembaga berfungsi dalam mempengaruhi interaksi dan hasil dalam situasi-situasi tertentu.

- *IAD Framework* menjadi populer di seluruh dunia karena memberikan cara yang fleksibel dan efektif untuk menganalisis berbagai situasi kelembagaan, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga pengambilan kebijakan publik. Pada tahun 2009, Elinor Ostrom menerima Hadiah Nobel Ekonomi sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam pemahaman tentang tata kelola sumber daya bersama. Kerangka IAD menjadi landasan utama dalam bidang ekonomi kelembagaan, ilmu politik, dan manajemen sumber daya alam.
- Setelah pengakuan Nobel, IAD Framework terus dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk tata kelola lingkungan, kebijakan publik, dan kajian tata kelola kolaboratif.

# KOMPONEN UTAMA DALAM IAD

1. Arena aksi (*action arena*)
2. Aturan yang berlaku (*rules in use*)
3. Pola interaksi dan hasil (*patterns of interaction and outcomes*)
4. Evaluasi dan umpan balik (*evaluation and feedback*)

# #1

## ARENA AKSI

➤ Arena aksi (*action arenas*) adalah tempat di mana interaksi antar individu atau kelompok terjadi yang melibatkan dua elemen utama yaitu :

1. Situasi tindakan (*action situation*): situasi spesifik di mana individu atau kelompok membuat keputusan berdasarkan informasi yang mereka miliki, kontrol yang mereka miliki, dan imbalan atau konsekuensi dari keputusan mereka.
2. Pelaku (*actors*): individu atau kelompok yang terlibat dalam situasi tindakan. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang, memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, dan berinteraksi berdasarkan aturan yang mengatur situasi tersebut.

## #2

# ATURAN YANG BERLAKU

Aturan-aturan yang benar-benar diikuti oleh individu atau kelompok dalam praktik sehari-hari, baik yang bersifat formal (misalnya; undang-undang atau peraturan pemerintah) maupun informal (misalnya; norma sosial atau kebiasaan). Aturan yang berlaku (*rules in use*) mungkin berbeda dari *rules in form* atau aturan tertulis yang seharusnya diikuti, karena dalam praktiknya, orang sering kali mengikuti aturan yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka, bukan hanya aturan tertulis.

## TUJUH (7) KLAS TER ATURAN (*RULES*)

- 1) ***Position rules*** : aturan tentang peran pelaku dalam posisinya. Contoh dalam kelompok tani ada aturan tentang peran ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota
- 2) ***Boundary rules*** : aturan yang secara spesifik mengatur “batasan” sebuah posisi. Contoh: aturan tentang pengangkatan atau pemberhentian anggota, ketua, pengurus, dan lain-lain.
- 3) ***Authority rules*** : aturan tentang kewenangan seseorang dalam suatu situasi-tindakan

- 4) **Aggregation rules** : aturan tentang bagaimana cara suatu keputusan dibuat atau ditentukan
- 5) **Information rules** : aturan yang terkait dengan akses informasi yang dapat diperoleh, distribusi, dan lainnya
- 6) **Payoff rules** : aturan tentang imbalan atau sanksi yang dapat atau mungkin diterima pelaku
- 7) **Scope rules** : aturan yang terkait dengan hasil akhir yang didapat dan hasil yang mutlak didapat tanpa terpengaruh situasi

## #3

# POLA INTERAKSI DAN HASIL

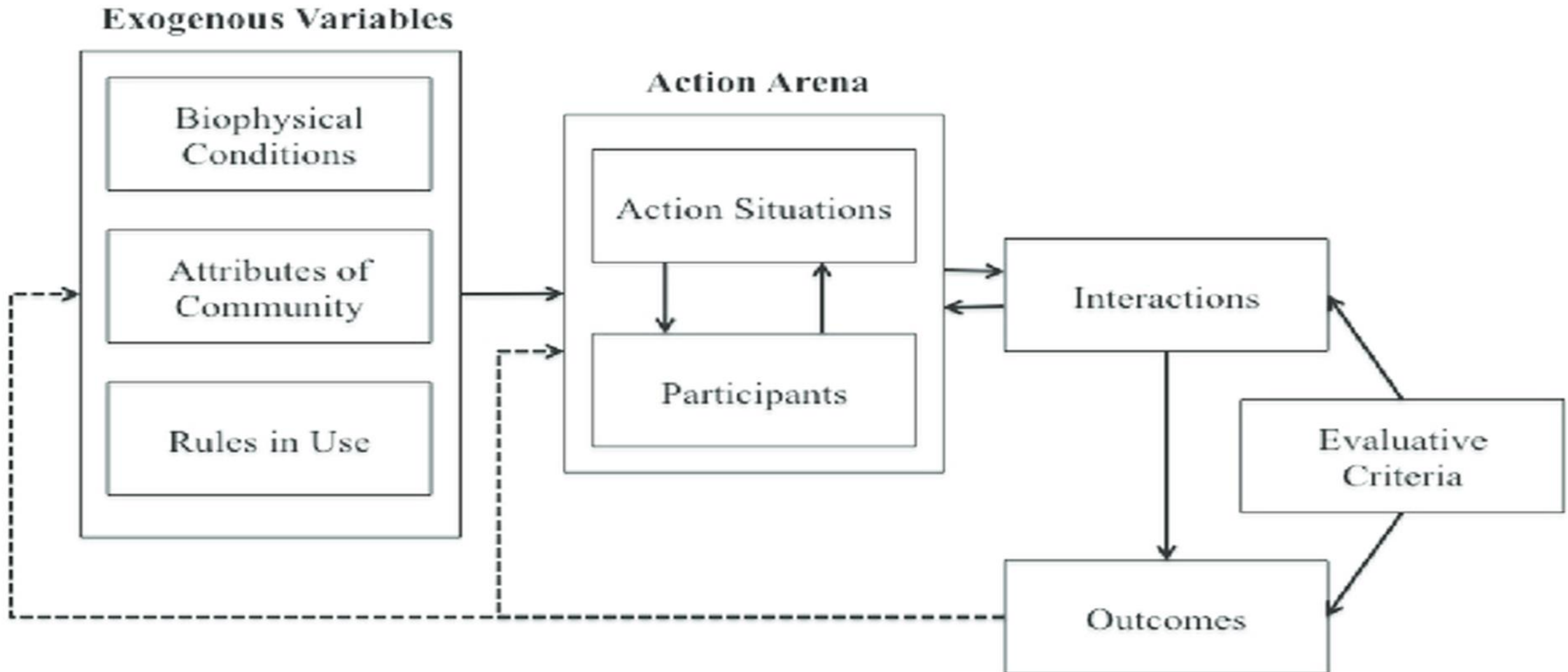
Pola interaksi (*patterns of interaction*) menggambarkan bagaimana interaksi antar aktor membentuk pola tertentu yang berulang dalam arena tindakan. Hasil akhir (*outcomes*) adalah hasil dari interaksi tersebut, yang dapat dievaluasi berdasarkan kriteria seperti efektivitas, efisiensi, dan keadilan.

## #4

# EVALUASI DAN UMPAN BALIK

Hasil asesmen (pengukuran) dievaluasi sebagai proses *feedback loop*, di mana hasil tersebut dapat mempengaruhi aturan dan tindakan di masa depan. Jika hasilnya dianggap positif, aturan yang berlaku bisa diperkuat; jika tidak, aturan tersebut mungkin perlu diubah.

# THE INSTITUTIONAL ANALYSIS AND DEVELOPMENT FRAMEWORK



# PENJELASAN KKAPK/IAD

Kerangka kerja APK/IAD Ostrom terbagi dalam tiga bagian: bagian kiri, tengah, dan kanan. Bagian kiri merupakan variabel eksogen, terdiri dari tiga komponen di dalamnya, yaitu:

1. Kondisi biofisik dan sumber daya/material dalam wujud fisik, finansial, dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat berupa *human capital* dan *social capital* (modal sosial).
2. Atribut masyarakat merujuk pada karakteristik masyarakat atau aktivitas organisasi yang berdampak terhadap kinerja.
3. Aturan formal dan informal yang berlaku pada organisasi. Aturan informal termasuk norma yang mungkin menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi.

- Bagian tengah diagram adalah arena aks/tindakan pelaku (masyarakat/kelompok dalam masyarakat) sebagai bagian dari situasi aksi. Arena aksi dapat berupa suatu organisasi atau masyarakat (petani, nelayan, pesisir, suatu bangsa, negara dll).
- Bagian kanan menggambarkan interaksi antara pelaku (masyarakat/kelompok dalam masyarakat), dalam mencapai hasil (*outcome*), yang dapat mempengaruhi alur umpan balik

# APLIKASI UMUM PENERAPAN IAD

1. Identifikasi Arena Aksi: Tentukan konteks spesifik dan situasi tindakan di mana aturan beroperasi. Misalnya, dalam pengelolaan irigasi, arena tindakan mungkin melibatkan para petani yang menggunakan air dari sungai yang sama.
2. Analisis Peraturan : Identifikasi aturan yang berlaku, baik formal maupun informal. Misalnya, aturan penggunaan air antara petani, batas waktu pengambilan air, serta sanksi bagi yang melanggar.

- Analisis Interaksi dan Hasil: Amati pola interaksi antar aktor dan hasil yang terjadi. Perhatikan apakah ada konflik, kerja sama, atau ketegangan dalam distribusi air.
- Evaluasi dan Rekomendasi: Evaluasi hasil tersebut berdasarkan tujuan seperti keadilan dan efisiensi. Jika terdapat ketimpangan dalam akses air, mungkin perlu diubah aturan atau tata kelola irigasi agar lebih adil.

# CONTOH APLIKASI IAD : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PEDESAAN

- Misalkan ada desa yang memiliki sumber daya air terbatas yang digunakan untuk irigasi oleh beberapa kelompok petani. Dengan menggunakan *IAD framework*, kita dapat:
  1. Mengidentifikasi arena aksi/tindakan: arena aksi menemukan para pelaku yang menggunakan air untuk irigasi. Misalnya, hanya petani saja atau ada masyarakat lain yang juga memanfaatkan air di irigasi

- Menentukan aturan yang berlaku: Misalnya, ada aturan informal bahwa petani di bagian hulu memiliki akses prioritas terhadap air, tetapi harus berbagi dengan petani di hilir selama musim kemarau.
- Mengamati pola interaksi: Dalam musim hujan, tidak ada konflik karena air cukup banyak. Namun, di musim kemarau, muncul ketegangan karena air terbatas dan petani di hilir sering kekurangan.
- Evaluasi: Temuan menunjukkan bahwa petani di hilir merasa dirugikan, dan aturan yang ada mungkin perlu diubah agar lebih adil, seperti membatasi waktu pengambilan air bagi petani di hulu.

Melalui kerangka IAD, kita dapat menganalisis ketidakadilan ini, merancang aturan baru, atau memperkenalkan teknologi tambahan (misalnya, bendungan kecil) untuk meningkatkan distribusi air yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, *Institutional Analysis and Development (IAD) Framework* merupakan alat analisis yang sangat berguna untuk memahami, menilai, dan memperbaiki tata kelola kelembagaan dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi.

## CATATAN:

Interpretasi KkAPK/IAD memerlukan ketajaman intuisi terhadap makna “aturan” formal dan informal dalam masyarakat. Interpretasi dari “aturan” inilah yang memperkaya temuan atau fakta empiris. Lepas dari jenis data (variabel) dan metode, kualitatif atau kuantitatif, nilai tambah KkAPK/IAD adalah interpretasi makna “aturan” yang tersembunyi di balik fakta empiris, dan seberapa transparan akses terhadap informasi didalam lembaga tersebut. Hasil analisis APK harus bisa mengungkap makna “aturan” mana yang sebenarnya mengatur lembaga, disamping aturan tertulis lembaga

# KESIMPULAN

- IAD Framework merupakan kerangka analisis kelembagaan yang komprehensif untuk memahami bagaimana lembaga mempengaruhi perilaku dan hasil dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan
- Dengan menekankan pentingnya aturan lokal (baik formal maupun informal) yang benar-benar digunakan dalam praktik, IAD membuka jalan bagi pemahaman yang lebih fleksibel dan kontekstual mengenai kelembagaan.

- IAD Framework berkembang sebagai alat analisis kelembagaan yang efektif dan inovatif, yang memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat dapat menciptakan dan memelihara kelembagaan untuk mengatasi tantangan bersama secara berkelanjutan.
- Berbeda dengan pendekatan konvensional yang mengusulkan privatisasi atau intervensi pemerintah sebagai solusi, IAD menunjukkan bahwa komunitas lokal sering kali mampu menciptakan aturan yang efektif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya mereka. Melalui pendekatan IAD, pembuat kebijakan dan peneliti dapat lebih memahami kompleksitas interaksi manusia dan lembaga dalam mencapai hasil sosial yang lebih baik dan berkelanjutan.

# REFERENSI

Ostrom, E. (2011) Background on the Institutional Analysis and Development Framework, *The Policy Studies Journal*, Vol. 39, No. 1, pp: 7 - 26

Rohman, A.Z. F., M. B. Prantama (2023) Desain Kelembagaan BUMDES: Menelaah Kerangka Kerja Analisis dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES Maju Bersama, Kabupaten Malang, *International Journal of Demos*, Volume 5, Issue 1, E-ISSN 2721-0642

Suwarno, E., H. Kartodihardjo, L. M. Kolopaking, S. Soedomo (2015) PENGGUNAAN KONSEP RULES-IN-USE OSTROM DALAM ANALISIS PERATURAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (*The Use of Ostrom's Concept on Rules-in-Use in the Analysis of Regulation of Forest Management Unit Formation*), *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 12 No. 1, Halaman: 13 – 26